

**KEPALA EKSEKUTIF PENGAWASAN PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
SEMINAR FORUM KOMUNIKASI DIREKTUR KEPATUHAN PERBANKAN
“PENERAPAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI BAGI
KONGLOMERASI KEUANGAN”
JAKARTA, 16 FEBRUARI 2015**

Yang Kami hormati,

Bp.Ogi Prastomiyono – Ketua Umum FKDKP;

Para Pengurus FKDKP;

Para Direktur Kepatuhan Perbankan dan Pimpinan Perbankan lainnya;

Para Nara Sumber;

dan Hadirin sekalian yang berbahagia,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

1. Pertama-tama saya ucapkan selamat memasuki tahun 2015. Tahun yang tidak lebih ringan tantangannya dibanding tahun 2014 yang lalu namun tetap menjanjikan harapan bagi terus bertumbuhnya industri perbankan kita. Kita sudah selayaknya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat yang dilimpahkan pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pagi hari ini untuk mengikuti Seminar yang bertemakan “Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan”.
2. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan yang telah menyelenggarakan acara ini dan mengundang saya untuk hadir. Saya selalu merasa senang setiap hadir dalam kegiatan seperti ini karena kegiatan seperti ini sangat membantu OJK dalam mensosialisasikan aturan-aturan yang baru kami keluarkan.

Bapak dan Ibu yang saya hormati

3. Baru saja kita melalui tahun 2014 yang penuh dinamika. Penurunan harga komoditas global, melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara partner dagang, dan gejolak politik serta perlambatan ekonomi domestik sangat mewarnai lingkungan bisnis perbankan ditahun 2014. Namun patut disyukuri bahwa meski pergerakan ekonomi global maupun domestik belum sepenuhnya kondusif, namun industri perbankan tetap mampu melewatinya dengan baik, meskipun memang terlihat ada perlambatan.
4. Hingga posisi Desember 2014, Total Asset, Kredit dan DPK perbankan nasional masing-masing masih bertumbuh sebesar 13,3% (*yoy*), 11,6% (*yoy*) dan 12,3% (*yoy*), menjadi sebesar Rp5.615 T, Rp3.674 triliun dan Rp4.114 triliun. Sementara itu, Dari sisi kinerja kredit, LDR industri berada dalam kisaran wajar sebesar 89,3%. Namun demikian, NPL menunjukkan peningkatan meski masih dalam rentang yang *manageable*. Rasio NPL gross berada pada kisaran 2,17%, atau sedikit meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu. Kombinasi perlambatan pertumbuhan kredit, naiknya NPL dan meningkatnya biaya dana sedikit menekan kinerja rentabilitas perbankan meski masih dalam rentang yang baik. Hingga posisi akhir tahun 2014, NIM industri tercatat 4,2%, ROA 2,9% dan BOPO berada pada level 76,3%. Hal yang juga menggembirakan adalah masih stabilnya kondisi perbankan dari sisi ketahanan. Rasio permodalan industri perbankan pada Desember 2014 (CAR) tercatat pada level 19,6% atau naik dari posisi bulan yang sama tahun lalu pada level 18,1%. Komitmen para pemegang saham untuk terus memperkuat permodalan dan pertumbuhan organik atas kinerja bisnis Saudara-Saudara sekalian patut dihargai. CAR perbankan tersebut sangat memadai untuk mendukung rencana ekspansi, sebagai buffer risiko, meminimalkan kerentanan dan melindungi perbankan dari gejolak eksternal.
5. Walau kinerja perbankan di tahun 2014 masih relatif baik, namun demikian kita tidak boleh terlena dalam menghadapi kondisi bisnis yang masih *volatile* dan penuh tantangan. Meski kondisi politik dan ekonomi domestik telah mulai stabil, namun proses pemulihan ekonomi global masih belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan di tahun 2015 ini. Perbankan Indonesia juga akan dihadapkan pada semakin ketatnya persaingan global sejalan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Oleh karena itu, upaya dalam meningkatkan daya tahan Sektor perbankan untuk mewujudkan stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu fokus utama yang harus menjadi perhatian kita semua kedepan.

Saudara-Saudara sekalian yang berbahagia,

6. Dalam konteks tantangan kedepan, terdapat beberapa hal yang akan mewarnai perkembangan dan pertumbuhan industri perbankan. Proses globalisasi dan pesatnya perkembangan sektor keuangan didukung dengan semakin berkembangnya teknologi informasi telah menciptakan sistem keuangan yang

- sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antara satu subsektor keuangan dengan subsektor keuangan yang lain. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan kedepan adanya keterkaitan antara lembaga jasa keuangan di berbagai subsektor karena hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Di industri perbankan Indonesia sendiri, konglomerasi keuangan juga memiliki peran yang sangat signifikan. Dari total 118 Bank Umum, kami sudah memetakan 16 Bank yang membentuk kelompok usaha keuangan yang apabila dikonsolidasikan telah menguasai $\pm 60\%$ total aset keuangan nasional.
7. Dampak positif keterkaitan antar sub sektor adalah adanya konglomerasi keuangan yang mampu meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan di Indonesia antara lain dengan meningkatnya skala ekonomi, meningkatnya efisiensi dengan pengembangan infrastruktur, *delivery channel*, promosi dan penguatan branding, meningkatnya pelayanan nasabah dengan *cross selling* dan saluran distribusi, serta meningkatkan kekokohan bisnis dengan kenaikan *fee based income*.
 8. Meskipun kelompok usaha keuangan memperoleh manfaat dari konsolidasi, konglomerasi dan internasionalisasi aktivitasnya, namun disisi lain proses konglomerasi tersebut meningkatkan risiko-risiko yang telah ada dan menimbulkan risiko-risiko baru baik bagi kelompok usaha keuangan itu sendiri maupun bagi sistem keuangan secara keseluruhan. Menyikapi dinamika dan risiko dari semakin maraknya konglomerasi keuangan, tentunya menuntut OJK sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan dan juga industri perbankan itu sendiri, untuk menata kembali dan menyelenggarakan suatu sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
 9. Sejalan dengan hal tersebut, OJK baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
 10. Dalam POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tersebut diatur bahwa Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan perlu memperhatikan seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha LJK, baik yang berasal dari perusahaan anak, maupun perusahaan terelasi (*sister company*), serta entitas lainnya yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka pengelolaan risiko secara lebih menyeluruh, Konglomerasi Keuangan harus menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi. Melalui penerapan manajemen risiko secara terintegrasi, Konglomerasi Keuangan akan mendapat manfaat antara lain pengelolaan risiko yang lebih baik, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha

Konglomerasi Keuangan yang pada gilirannya dapat menghasilkan sinergi serta meningkatkan kapasitas bisnis dan permodalan Konglomerasi Keuangan. Terdapat beberapa kriteria umum atas penerapan manajemen risiko pada Konglomerasi Keuangan dimaksud antara lain; adanya kerangka manajemen risiko secara *group-wide*; terciptanya budaya manajemen risiko; terdapat kebijakan *risk appetite* dan *risk tolerance* pada Level Grup; dan sistem dan proses yang efektif untuk mengelola dan melaporkan risiko yang terkonsentrasi secara *group-wide*. Diharapkan dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan dapat menjadi salah satu sarana untuk turut mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

11. Sementara itu, POJK Nomor 18/POJK.03/2014 menekankan diperlukannya penerapan tata kelola yang baik yang *holistic* dan *enterprise wide* bagi Konglomerasi Keuangan sehingga Konglomerasi Keuangan dapat meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum. Secara umum, POJK ini mencakup antara lain:

- Kerangka *Corporate Governance* Konglomerasi Keuangan, kesesuaian struktur kelompok usaha dan struktur manajerial dengan strategi dan profil risiko Grup Konglomerasi Keuangan;
- Integritas, kompetensi, pengalaman, dan kualifikasi dari manajemen yang memadai, strategi serta *risk appetite* yang diimplementasikan dan dijalankan secara memadai oleh seluruh entitas dalam Grup Konglomerasi Keuangan; serta
- Kebijakan remunerasi yang sesuai dan memadai serta konsisten dengan profil risikonya.

12. Selain dari pada kedua POJK yang telah saya sebutkan tersebut, kedepannya untuk melengkapi sistem Pengawasan Terintegrasi terhadap konglomerasi LJK yang telah dirintis di tahun 2014 lalu, OJK juga akan mengambil beberapa langkah sebagai berikut:

- Memperkuat penerapan pengawasan terintegrasi dengan mengatur kewajiban penyediaan modal minimum bagi konglomerasi keuangan. Kebijakan ini akan melengkapi regulasi mengenai penerapan tata kelola dan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan yang telah Kami keluarkan sebelumnya.
- Menyelaraskan standardisasi laporan keuangan pelaku Sektor Jasa Keuangan sehingga memudahkan para pemangku kepentingan dalam menganalisis dan memahami kinerja keuangan lembaga jasa keuangan, baik secara solo basis maupun konglomerasi.
- Memperkuat standar penerapan *good corporate governance* pada level konglomerasi

Hadirin sekalian yang berbahagia

13. Dalam kesempatan ini saya juga ingin kembali mengingatkan kita semua bahwa sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, harus dapat meningkatkan sinergi dalam upaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam konteks ini, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam *Financial Executive Gathering* baru-baru ini terdapat 3 (tiga) hal pertanyaan utama yang kiranya harus kita jawab bersama kedepan:

- Pertama, bagaimana Sektor perbankan kita dapat mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan kegiatan perekonomian?
- Kedua, bagaimana meningkatkan daya tahan Sektor Jasa Keuangan kita untuk mewujudkan stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan?
- Ketiga, bagaimana Sektor Jasa Keuangan dapat berperan dalam meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan?

14. Merespon hal tersebut, perlu kiranya kita melihat kembali arah dan focus ekspansi bisnis bank Saudara-Saudara sekalian dalam mendukung program pemerintah antara lain :

- Menekankan pada sektor-sektor yang mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan pemerataan dan penurunan kemiskinan. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan produk dan layanan yang dapat diakses oleh masyarakat menengah ke bawah;
- Memberikan perhatian khusus bagi usaha mikro dan kecil sehingga berdaya saing tinggi, dapat bertumbuh dan berkembang menjadi usaha menengah, bahkan menjadi usaha besar;
- Kesiapan menghadapi globalisasi, terutama kemampuan memberikan dukungan pada peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan rentan akibat volatilitas harga komoditas;
- Memperluas dan memperkuat ekonomi pedesaan, khususnya dalam mengembangkan sektor pertanian yang masih terkendala pada minimnya sarana dan prasarana produksi serta terbatasnya akses terhadap kredit dan jasa keuangan untuk petani;
- Mendorong terbentuknya kelembagaan keuangan yang membuka peluang bagi terciptanya akses masyarakat kurang mampu terhadap modal dan peningkatan aset kepemilikan.

15. Sangat disadari pula bahwa seluruh inisiatif tadi perlu dilengkapi oleh peningkatan edukasi dan akses keuangan masyarakat. OJK secara intens telah melakukan edukasi terkait literasi keuangan masyarakat secara terstruktur dan masif. Pada tahun 2015, program edukasi OJK membidik kalangan pelajar/mahasiswa dan para profesional. Agar program ini efektif, saya menghimbau pimpinan perbankan untuk dapat mengembangkan produk/layanan perbankan yang sesuai bagi berbagai kalangan masyarakat, a.l. pelajar/mahasiswa, profesional dan masyarakat kecil.

Bapak dan Ibu yang berbahagia,

16. Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali bahwa kedepannya kondisi perekonomian maupun industri keuangan akan dipenuhi oleh berbagai macam tantangan. Namun saya tetap yakin masa depan industri perbankan di Indonesia pastinya akan diwarnai oleh potensi yang besar. Oleh karena itu, bagaimana perbankan menghadapi situasi yang masih akan diwarnai oleh ketidakpastian dan peningkatan risiko akan sangat menentukan ketahanan ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Perbankan Indonesia tidak boleh terlena dan harus selalu berupaya untuk memperkuat dan memperbaiki kinerjanya kedepan. Bagi perbankan hal ini berarti perubahan yang dilakukan harus pula diiringi oleh pendekatan baru dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko serta bagaimana menyeimbangkan antara risiko dan kebutuhan perbankan sebagai institusi business.
17. Saya berharap kiranya kegiatan yang diadakan pada hari ini dapat memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai arti pentingnya kita selalu bersiap diri dalam menghadapi berbagai tantangan kedepan termasuk dalam konteks mempersiapkan diri dalam penerapan kerangka pengembangan pengawasan terintegrasi yang dilakukan OJK.
18. Akhir kata, saya juga mengharapkan kiranya kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para nara sumber yang telah bersedia hadir dan berbagi dalam kegiatan ini

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi niat baik yang akan kita lakukan dan semoga langkah-langkah kita di tahun ini mendapatkan ridha dari Nya.

Sekian dan terima kasih. Selamat mengikuti Seminar.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh